

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat III Tahun 2015 yang merupakan laporan hasil pelaksanaan tugas pertanggungjawaban akuntabilitas terhadap kinerja sekaligus bahan evaluasi terhadap hasil yang telah dicapai selama 1 (satu) tahun anggaran.

Dalam perspektif lebih luas LAKIP dimaksudkan sebagai alat pengendali, alat penilai kualitas kinerja, dan alat pendorong terwujudnya *good governance* sekaligus bentuk pertanggungjawaban kepada publik (*Public Accountability*).

LAKIP Inspektorat III tahun 2015 menyajikan akuntabilitas kinerja secara sistematis tentang keberhasilan, kegagalan, hambatan, permasalahan yang dihadapi, serta langkah-langkah antisipatif yang diambil.

Penyusunan LAKIP tahun 2015 Inspektorat III disusun berdasarkan pedoman penyusunan LAKIP sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu diharapkan saran dan masukan dari semua pihak dalam rangka perbaikan di masa yang akan datang.

Jakarta, Januari 2016

Inspektur III,

Prayono

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sesuai dengan dinamika reformasi birokrasi dewasa ini, terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sehingga hasil diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik.

Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang baik, transparan, terukur, dan sesuai ketentuan sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terlaksana secara, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Agar fungsi - fungsi pengawasan dapat terselenggara dengan baik, telah disusun program kegiatan tahun 2015 dengan didasarkan pada arah dan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang akan di tempuh .

Arah kebijakan pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal dalam tahun 2015 adalah :

1. Optimalisasi peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan berbasis pada pembinaan, dimana Inspektorat Jenderal tidak hanya melaksanakan fungsi pemeriksaan, tetapi juga sebagai *Counseling Partner* (Mitra Kerja);
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengawasan yang cerdas dan profesional sesuai dengan kompetensi yang di butuhkan;
3. Penyempurnaan sistem dan prosedur pengawasan dengan mewujudkan ketaatan, ketertiban, efisiensi, efektivitas dan ekonomis dalam pelaksanaan tugas.

Sedangkan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang akan diselenggarakan adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengawasan berbasis kinerja dengan mengedepankan aspek pembinaan kepada seluruh satuan kerja dalam rangka menjamin tercapainya program dan sasaran kinerja auditi;

2. Meningkatkan peran pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan program dan anggaran, pembinaan serta pengembangan industri;
3. Mewujudkan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel;
4. Meningkatkan profesionalisme aparat pengawasan;
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana;
6. Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal;
7. Menerapkan audit berbasis resiko.

Pencapaian tujuan tersebut dilakukan melalui penetapan kebijakan teknis, program, dan kegiatan pengawasan. Berdasarkan pelaksanaan program tahun 2015, nilai capaian kinerja Inspektorat III termasuk dalam kategori **sangat baik** dengan capaian yaitu 99,03 % yang terdiri dari:

a. Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder (S)

- 1) Meningkatnya ketaatan terhadap perundang-undang dengan berhasil memenuhi target Persentase temuan BPK dibawah materiality threshold < 3% (realisasi 0,3324%);
- 2) Meningkatnya akuntabilitas kinerja dengan Memperoleh Predikat BB pada Nilai SAKIP Kementerian;
- 3) Meningkatnya Integritas Pelayanan Publik dengan pencapaian Persentase kepatuhan unit melaksanakan pelayanan publik sesuai standar pelayanan minimum sebesar 91,65 % ;
- 4) Meningkatnya efektivitas penerapan sistem pengendalian internal dengan terpenuhinya target 100 % pada Jumlah satuan kerja yang menerapkan Sistem Pengendalian Intern hingga level 3;
- 5) Meningkatnya kualitas evaluasi pelaksanaan kebijakan industri dengan memberikan 1 rekomendasi Kebijakan.

b. Perspektif Proses Internal

Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengawasan dengan Pencapaian Persentase Pelaksanaan pengawasan yang sesuai PKPT, Persentase pengawasan yang sesuai pedoman dan prosedur /standar pengawasan serta Opini BPK atas laporan keuangan kementerian sebesar 100%

c. Perspektif Pembelajaran Organisasi

- 1) Meningkatnya kemampuan SDM APIP dengan pencapaian Persentase pegawai yang sesuai diklat dari seluruh pegawai Inspektorat III, Jumlah auditor yang menulis artikel/karya tulis yang dipublikasikan serta Persentase kepuasan pelanggan terhadap layanan pengawasan sebesar 99,63%;
- 2) Organisasi yang efektif dengan pencapaian Nilai akuntabilitas kinerja Inspektorat III dan Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 :2008 sebesar 100 %;
- 3) Perencanaan dan penganggaran yang berkualitas dengan Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan dan Persentase penyerapan anggaran Inspektorat III yang sudah mencapai target 100 %.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
BAB I.....	6
PENDAHULUAN	6
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI	6
B. STRUKTUR ORGANISASI.....	6
C. PERAN STRATEJIK ORGANISASI.....	7
BAB II	9
PERENCANAAN STRATEJIK.....	9
A. RENCANA STRATEJIK ORGANISASI	9
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2013.....	11
C. RENCANA ANGGARAN INSPEKTORAT III TAHUN 2013.....	15
D. DOKUMEN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013.....	12
BAB III	17
AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. GAMBARAN UMUM AKUNTABILITAS KINERJA.....	17
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	18
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN	22
BAB IV.....	24
PENUTUP	24
A. TINJAUAN UMUM KEBERHASILAN/KEGAGALAN	24
B. PERMASALAHAN/KENDALA	24
C. UPAYA DAN STRATEGI PEMECAHAN	24
LAMPIRAN 1.....	25
LAMPIRAN 2.....	27

BAB I

PENDAHULUAN

A. STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT III

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor. 105/M-IND/PER/10/2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Organisasi Inspektorat III terdiri dari :

1. Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja
2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat, dokumen serta kearsipan Inspektorat III.

Subbagian Tata Usaha secara fungsional bertanggung jawab kepada Inspektur dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala bagian Kepegawaian dan Umum.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Inspektur III

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Agro, Sekretariat Jenderal, dan Pusat Data dan Informasi.

Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat III menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
- b. pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan manajemen kinerja Inspektorat III.

Inspektorat III membawahi :

a. Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja.

1) Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja mempunyai tugas melakukan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, dan dokumentasi serta manajemen kinerja Inspektorat III;

2) Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja secara fungsional bertanggung jawab kepada Inspektur III dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian.

b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional auditor terdiri dari sejumlah jabatan fungsional auditor yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing kelompok jabatan fungsional auditor dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur Jenderal.

C. PERAN DAN STRATEGIS

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, peran Inspektorat III dalam pembangunan Industri adalah :

1. Mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mempraktekan prinsip-prinsip *good governance*. Terwujudnya *good governance* merupakan tuntutan bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna dan bebas KKN.
2. Memfokuskan pada pembimbingan - pendampingan dan pengawasan sebagai mitra manajemen dengan melakukan bimbingan maupun konsultasi untuk membantu pencapaian tujuan organisasi selain tugas-tugas pemeriksaan.
3. Pelimpahan hampir seluruh tugas sektor Industri kepada pemerintah daerah, merupakan cermin dari konsistensi Kementerian Perindustrian dalam

mengaktualisasikan Peraturan / Perundang-Undangan. Namun demikian, dari sisi pengawasan masih terdapat perbedaan pemahaman yang berimplikasi terhadap pengawasan yang dilakukan pemerintah. Dengan terbitnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diatur lebih lanjut melalui PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, maka pengaturan pengawasan yang menjadi kewenangan pemerintah dan pemerintahan daerah menjadi lebih jelas.

4. Dalam menyikapi perkembangan paradigma pengawasan sebagaimana dimaksud di atas, maka Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian memiliki peran strategis dalam rangka mendayagunakan pengawasan di lingkungan Kementerian Perindustrian.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIK INSPEKTORAT

Perencanaan stratejik merupakan langkah awal dalam melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Untuk itu, perencanaan stratejik yang disusun haruslah mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistis dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Inspektorat Jenderal sebagai aparat pengawasan fungsional di lingkungan Kementerian Perindustrian dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. VISI

Visi Inspektorat Jenderal sesuai dengan Renstra adalah ***“Terwujudnya pengawasan sebagai mitra kerja dan penjaminan mutu pencapaian sasaran pembangunan industri”***

2. MISI

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, Misi Inspektorat Jenderal sebagai Berikut :

- a. Mengoptimalkan fungsi pengawasan sesuai dengan konsep fungsi manajemen.
- b. Melaksanakan Pengawasan, Evaluasi dan Pengendalian berbasis pembinaan.
- c. Mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan RI terhadap Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian Tahun 2013 yang telah diterima pada bulan Mei 2014.
- d. Menerapkan standar Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 yang diperoleh pada bulan Februari 2014.
- e. Membangun Pengawasan sebagai salah satu pilar untuk meminimalisir penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dalam rangka terciptanya *good governance*.
- f. Mengedepankan transparansi sebagai wadah *check and balance* pengelolaan pemerintahan di bidang industri, khususnya akuntabilitas penggunaan keuangan negara.

- g. Menempatkan pengawasan secara independen terhadap obyek pengawasan/ pemeriksaannya.
- h. Melaksanakan advokasi, asistensi dan konsultansi pelaksanaan kegiatan unit kerja.

3. TUJUAN

Berdasarkan visi dan misi sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Menjamin agar pelaksanaan kegiatan Kepemerintahan Kementerian Perindustrian berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- b. Mendukung penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, bersih dan bebas dari KKN; dan
- c. Mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

4. SASARAN

Untuk Mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan diwujudkan adalah meningkatnya kinerja pengawasan di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Meningkatnya kinerja semua unsur Kementerian dengan terlaksananya program pembangunan serta mencegah dan menekan hingga sekecil mungkin penyalahgunaan wewenang, kebocoran, serta pemborosan keuangan Negara dan segala jenis pungutan liar.

5. KEBIJAKAN DAN STRATEGIS

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pengawasan tersebut, Inspektorat III telah menetapkan kebijakan pengawasan tahun 2015 :

- a. Melaksanakan pengawasan berbasis kinerja dengan mengedepankan aspek pembinaan kepada seluruh satuan kerja dalam rangka menjamin tercapainya program dan sasaran kinerja audit;
- b. Meningkatkan peran pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan program dan anggaran, pembinaan serta pengembangan industri;
- c. Mewujudkan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel;
- d. Meningkatkan profesionalisme aparat pengawasan;

- e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana;
- f. Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal;
- g. Menerapkan audit berbasis resiko.

B. RENCANA KINERJA INSPEKTORAT III TAHUN 2015

Program Inspektorat III adalah "Pengawasan dan Layanan Manajemen Kinerja Inspektorat III", dengan kegiatan pada Tahun 2015 sebagai berikut :

Tabel 1. Sasaran Program/Kegiatan Pengawasan dan Layanan Manajemen Kinerja Inspektorat III Tahun Anggaran 2015

No	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET OUTPUT
1.	Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat III a. Laporan Pengawasan Kinerja Unit Pusat dan Vertikal Inspektorat III b. Laporan Pengawasan Dekonsentrasi Perindustrian Inspektorat III c. Laporan Pengawasan untuk Tujuan Tertentu/Riksus Inspektorat III	15 Unit/Laporan 8 Unit/Laporan 1 Unit/Laporan
2	Terlaksananya Hasil Reviu a. Reviu Laporan Keuangan/ BMN unit kerja Pusat/ vertikal b. Reviu Perencanaan dan Program Inspektorat III	30 Unit/Laporan 2 Unit/Laporan
3	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Inspektorat III a. Laporan Hasil Monitoring dan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat III b. Laporan Hasil Monitoring dan evaluasi PMPRB	3 Unit/Laporan 1 Unit/ Laporan
4	Layanan Manajemen Kinerja Inspektorat III	12 Bulan Layanan

5	Dokumen akuntabilitas Pengawasan Inspektorat III	1 Dokumen
---	--	-----------

C. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2015

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Rencana kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian tahun 2015, di implementasi melalui kegiatan-kegiatan secara rinci, sebagaimana pada tabel 2.2

Tabel 2. Penganggaran Kegiatan Inspektorat III Tahun 2015

NO	KEGIATAN		VOLUME	JUMLAH
1	2		3	4
1	1843.001	LAPORAN HASIL PENGAWASAN INSPEKTORAT III		1.359.720.000
I	1843.001.001	LAPORAN PENGAWASAN KINERJA UNIT PUSAT DAN VERTIKAL INSPEKTORAT III	15 Laporan	830.405.000
	011	PERSIAPAN PENGAWASAN		19.330.000
	012	PELAKSANAAN PENGAWASAN		788.345.000
	013	PELAPORAN HASIL PENGAWASAN		22.730.000
II	1843.001.002	LAPORAN PENGAWASAN DEKONSENTRASI PERINDUSTRIAN INSPEKTORAT III	8 Laporan	427.707.000
	011	PERSIAPAN PENGAWASAN		6.832.000
	012	PELAKSANAAN PENGAWASAN		412.107.000
	013	PELAPORAN HASIL PENGAWASAN		8.768.000
III	1843.001.003	LAPORAN PENGAWASAN UNTUK TUJUAN TERTENTU/ RIKSUS INSPEKTORAT III	1 LAPORAN	101.608.000
	011	PERSIAPAN PENGAWASAN		1.616.000
	012	PELAKSANAAN PENGAWASAN		98.240.000
	013	PELAPORAN HASIL PENGAWASAN		1.752.000
2	1843.002	LAPORAN HASIL REVIU INSPEKTORAT III		751.580.000
I	1843.002.001	LAPORAN HASIL REVIU KEUANGAN/ BMN UNIT PUSAT DAN VERTIKAL INSPEKTORAT III	30 LAPORAN	701.692.000
	011	PERSIAPAN REVIU		25.008.000
	012	PELAKSANAAN REVIU		643.476.000
	013	PELAPORAN HASIL REVIU		33.208.000
II	1843.002.002	LAPORAN HASIL REVIU PERENCANAAN DAN PROGRAM INSPEKTORAT III	2 LAPORAN	49.888.000
	011	PERSIAPAN REVIU		1.642.000
	012	PELAKSANAAN REVIU		46.240.000
	013	PELAPORAN HASIL REVIU		2.024.000
3	1843.003	LAPORAN HASIL MONITORING EVALUASI INSPEKTORAT III		754.142.000
I	1843.003.001	LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI SISTEM	3	42.140.000

		AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAN (SAKIP) INSPEKTORAT III	LAPORAN	
	011	PERSIAPAN MONITORING DAN EVALUASI		12.670.000
	012	PELAKSANAAN MONITORING EVALUASI		16.800.000
	013	LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI		12.670.000
II	1843.003.002	LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PMPRB	1 LAPORAN	712.002.000
	011	PELAKSANAAN panel		176.170.000
	012	PELAKSANAAN SURVEI		399.742.000
	013	LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI		136.090.000
3	1843.004	LAYANAN MANAJEMEN PENGAWASAN INSPEKTORAT III	12 bulan layanan	394.520.000
	011	KOORDINASI DAN KONSULTASI INTERNAL/EKSTERNAL PENGAWASAN INSPEKTORAT III		186.480.000
	012	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT III		28.450.000
4	1843.005	DOKUMEN AKUNTABILITAS KINERJA PENGAWASAN INSPEKTORAT III	1 DOKUMEN	182.680.000
TOTAL				3.442.642.000

D. DOKUMEN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015

Berdasarkan rencana kinerja yang telah disusun, dengan didukung pembiayaan dan mendapatkan persetujuan dalam bentuk DIPA, maka ditetapkan kinerja yang akan di capai yang dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut :

Tabel 3. Penetapan Kinerja (TAPKIN) Inspektorat III Tahun Anggaran 2015

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder (S)			
1	Meningkatnya ketaatan terhadap perundang-undang	Persentase temuan BPK dibawah materiality threshold	<3 %
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP Kementerian	Predikat B
		Persentase nilai SAKIP satuan kerja Eselon I minimal B	85 %
3	Meningkatnya Integritas Pelayanan Publik	Persentase kepatuhan unit melaksanakan pelayanan publik sesuai standar pelayanan minimum	75 %
4	Meningkatnya efektivitas penerapan sistem pengendalian internal	Jumlah satuan kerja yang menerapkan Sistem Pengendalian Intern hingga level 3	6 satker
5	Meningkatnya kualitas evaluasi pelaksanaan kebijakn industri	Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri yang ditindak lanjuti	1 Rekomendasi kebijakan

Perspektif Proses Internal			
6	Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengawasan	Persentase Pelaksanaan pengawasan yang sesuai PKPT	90 %
		Persentase pengawasan yang sesuai pedoman dan prosedur /standar pengawasan	80 %
		Opini BPK atas laporan keuangan kementerian	WTP
Perspektif Pembelajaran Organisasi			
7	Meningkatnya kemampuan SDM APIP	Persentase pegawai yang sesuai diklat dari seluruh pegawai Inspektorat III	90 %
		Jumlah auditor yang menulis artikel/karya tulis yang dipublikasikan	4 orang
		Persentase kepuasan pelanggan terhadap layanan pengawasan	90 %
8	Organisasi yang efektif	Nilai akuntabilitas kinerja Inspektorat III	B
		Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 :2008	1 Sertifikat
9	Perencanaan dan penganggaran yang berkualitas	Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan	85 %
		Persentase penyerapan anggaran Inspektorat III	90 persen

Sasaran strategis sebagaimana terdapat dalam Tapkin Inspektorat III Tahun 2015 jika dikaitkan dengan kegiatan yang tertuang dalam DIPA, maka sasaran kinerja tersebut dicapai melalui :

1. Meningkatnya ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan melalui Reviu RKA-K/L unit pusat dan vertikal di bawah cakupan tugas Inspektorat III dan kegiatan pengawasan kinerja unit pusat dan vertikal di bawah cakupan tugas Inspektorat III serta kegiatan pengawasan dekosentrasi di bawah cakupan tugas Inspektorat III;
2. Meningkatnya akuntabilitas aparatur dan kinerja Kementerian Perindustrian melalui monitoring dan evaluasi SAKIP pada unit eselon I di bawah cakupan tugas Inspektorat III;

3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui pengawasan kinerja unit pusat dan vertikal di bawah cakupan tugas Inspektorat III;
4. Meningkatnya efektifitas penerapan sistem pengendalian internal melalui pengawasan kinerja unit pusat dan vertikal di bawah cakupan tugas Inspektorat III;
5. Meningkatnya kualitas evaluasi pelaksanaan kebijakan industri melalui monitoring dan evaluasi RB dan PMPRB;
6. Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengawasan melalui Reviu Keuangan/BMN unit pusat dan vertikal di bawah cakupan tugas Inspektorat III, dan kegiatan pengawasan kinerja unit pusat dan vertikal di bawah cakupan tugas Inspektorat III serta kegiatan pengawasan dekonsentrasi di bawah cakupan tugas Inspektorat III dan kegiatan pengawasan untuk tujuan tertentu;
7. Meningkatnya kemampuan SDM APIP melalui Layanan Manajemen Pengawasan;
8. Penciptaan Organisasi yang efektif melalui Layanan Manajemen Pengawasan;
9. Perencanaan dan penganggaran yang berkualitas melalui Dokumen Akuntabilitas Pengawasan Inspektorat.

Guna mencapai target yang telah ditetapkan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka disusun program/kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka program kerja pengawasan Inspektorat III meliputi :
 - a. Pemeriksaan terhadap unit Eselon I pada 2 auditi.
 - b. Pemeriksaan terhadap unit Pusat - Pusat pada 1 auditi.
 - c. Pemeriksaan terhadap Dekonsentrasi/PIKM pada 8 auditi.
 - d. Pemeriksaan terhadap Balai Besar dan Baristand pada 6 auditi.
 - e. Pemeriksaan terhadap Sekolah - Sekolah dan Balai Diklat 6 auditi.
2. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka program pemantauan dan evaluasi Inspektorat III, antara lain:
 - a. Monitoring dan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 3 unit.
 - b. Monitoring dan evaluasi terhadap program/kegiatan aktual bidang industri (Reformasi Birokrasi) 1 laporan.

3. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka reviu yaitu Reviu Laporan Keuangan dan Barang Milik negara (BMN) sebanyak 15 auditi dan Reviu Perencanaan Program (RKAKL).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Inspektorat III merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban Inspektur III kepada Inspektur Jenderal, khususnya mengenai pengawasan atas penyelenggaraan tugas pokok Kementerian Perindustrian pada tahun 2015.

Untuk mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Inspektorat III yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Inspektorat III dan Penetapan Kinerja Tahun 2015 Inspektorat III melaksanakan program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kementerian Perindustrian. Program ini di jabarkan melalui kegiatan peningkatan pengawasan dan akuntabilitas pelaksanaan program antara lain kegiatan :

1. Pengawasan dan pengendalian internal terhadap tugas dan fungsi unit-unit kerja dilingkungan Kementerian (audit kinerja, audit Dekon dan Riksus),
2. Kegiatan reviu terhadap Laporan Keuangan, BMN dan reviu Perencanaan Program (RKAKL),
3. Kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan Inspektorat III yaitu : Monev Sakip, Sarana dan Prasarana, Pelayanan Publik dan Monev Reformasi Birokrasi.
4. Kegiatan layanan manajemen Kinerja dengan kegiatan koordinasi /konsultasi internal/eksternal pengawasan Inspektorat III dan Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat III
5. Kegiatan penyusunan dokumen Akuntabilitas Kinerja Pengawasan Inspektorat III dalam melaksanakan kegiatan ini didukung dengan anggaran tahun 2015 sebesar Rp. 3.442.642.000

A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Secara umum Inspektorat III telah melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Pengawasan sesuai dengan peraturan Menteri Perindustrian No. 105 / M-IND/PER/10/2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian . Berdasarkan evaluasi nilai capaian yang dilakukan terhadap pencapaian kinerja inspektorat III tahun 2014 termasuk termasuk dalam kategori sangat baik, dengan nilai rata-rata sebesar 99,03 % adapun rincian

analisis capaian masing-masing sasaran dapat dilihat pada tabel 4 sebagai berikut :

Tabel 4. Analisa capaian kinerja Inspektorat III tahun 2015

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder (S)				
1	Meningkatnya ketaatan terhadap perundang-undang	Persentase temuan BPK dibawah materiality threshold	<3 %	0,3324%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP Kementerian	Predikat B	BB
		Persentase nilai SAKIP satuan kerja Eselon I minimal B	85 %	100%
3	Meningkatnya Integritas Pelayanan Publik	Persentase kepatuhan unit melaksanakan pelayanan publik sesuai standar pelayanan minimum	75 %	68,74%
4	Meningkatnya efektivitas penerapan sistem pengendalian internal	Jumlah satuan kerja yang menerapkan Sistem Pengendalian Intern hingga level 3	6 satker	7 Satker
5	Meningkatnya kualitas evaluasi pelaksanaan kebijakan industri	Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri yang ditindak lanjuti	1 Rekomendasi kebijakan	1 Rekomendasi kebijakan
Perspektif Proses Internal				
6	Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengawasan	Persentase Pelaksanaan pengawasan yang sesuai PKPT	90 %	92%
		Persentase pengawasan yang sesuai pedoman dan prosedur /standar pengawasan	80 %	100 %
		Opini BPK atas laporan keuangan kementerian	WTP	WTP pemeriksaan oleh BPK
Perspektif Pembelajaran Organisasi				
7	Meningkatnya kemampuan SDM APIP	Persentase pegawai yang sesuai diklat dari seluruh pegawai Inspektorat III	90 %	100%
		Jumlah auditor yang menulis artikel/karya tulis yang	4 orang	4 orang

		dipublikasikan		
		Persentase kepuasan pelanggan terhadap layanan pengawasan	90 %	89%
8	Organisasi yang efektif	Nilai akuntabilitas kinerja Inspektorat III	B	B
		Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 :2008	1 Sertifikat	1 sertifikasi
9	Perencanaan dan penganggaran yang berkualitas	Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan	85 %	99%
		Persentase penyerapan anggaran Inspektorat III	90 persen	96,13 persen

Berdasarkan tabel diatas, pencapaian atas target dalam Tapkin Inspektorat III tahun 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Perspektif Pemangku Kepentingan/Stakeholder (S)

a. Meningkatnya ketaatan terhadap perundang-undang

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentase temuan BPK dibawah materiality threshold	<3 %	0,3324%	100

Prosentase temuan BPK atas pemeriksaan tahun 2014 yang bersifat materil adalah sebesar 0,3324 %, hal ini menunjukkan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal secara umum Inspektorat III khususnya sangat efektif karena realisasi yang dicapai cukup jauh dari target temuan BPK di bawah Materiality Threshold sebesar < 3 %.

b. Meningkatnya akuntabilitas kinerja

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Nilai SAKIP Kementerian	Predikat B	BB	100
Persentase nilai SAKIP satuan kerja Eselon I minimal B	85 %	100%	100

Predikat SAKIP yang diperoleh Kementerian Perindustrian adalah Predikat BB dan Eselon I mendapat nilai 85. Penilaian dalam predikat SAKIP dilakukan pada pencapaian kinerja tahun 2014 atas rencana kinerja dan

penetapan kinerja tahun 2014 yang telah ditetapkan dilingkungan Kementerian Perindustrian secara menyeluruh dan khususnya unit Eselon I dilingkungan Kementerian Perindustrian. Dalam mendukung pencapaian target tersebut, Inspektorat III sudah dilaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi SAKIP yang dilakukan pada Triwulan IV tahun 2015;

c. Meningkatnya Integritas Pelayanan Publik

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentase kepatuhan unit melaksanakan pelayanan publik sesuai standar pelayanan minimum	75 %	68,74%	91,65

Penilaian atas pelayanan publik dilakukan dilakukan dalam tahapan pelaksanaan audit kinerja pada unit dilingkungan Kementerian Perindustrian untuk melihat kepatuhan setiap unit kerja dalam melaksanakan peraturan di bidang Pelayanan Publik. Pada tahun 2015 sudah dilaksanakan Audit Kinerja pada 9 unit kerja dilingkungan Kementerian Perindustrian, yaitu Sekretaris Jenderal , Direktur Jenderal Industri Agro, Pusat Data dan Informasi, BBIA Bogor, Baristand Pontianak, Baristand Banjar baru, Baristand Surabaya, BDI Jakarta, BDI Padang.

d. Meningkatnya efektivitas penerapan sistem pengendalian internal

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah satuan kerja yang menerapkan Sistem Pengendalian Intern hingga level 3	6 satker	7 Satker	100

Jumlah satuan kerja dibawah pengawasan Inspektorat III yang menerapkan sistim pengendalian intern hingga level 3 adalah Sekretaris Jenderal , Direktur Jenderal Industri Agro, Pusat Data dan Informasi, BBIA Bogor, B4T Bandung, Baristand Surabaya, BDI Jakarta, BDI Padang;

e. Meningkatnya kualitas evaluasi pelaksanaan kebijakan industri

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri yang ditindak lanjuti	1 Rekomendasi kebijakan	1 Rekomendasi kebijakan	100

Pada tahun 2015 rekomendasi perbaikan kebijakan industri yang diberikan adalah kebijakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

2. Perspektif Proses Internal

a. Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengawasan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentase Pelaksanaan pengawasan yang sesuai PKPT	90 %	92%	100
Persentase pengawasan yang sesuai pedoman dan prosedur /standar pengawasan	80 %	100 %	100
Opini BPK atas laporan keuangan kementerian	WTP	WTP pemeriksaan oleh BPK	100

Persentase pelaksanaan pengawasan yang sesuai PKPT pada Inspektorat III yang dilaksanakan pada tahun 2015 dapat dilakukan dengan tingkat kesesuaian sebesar 92 %. Kegiatan-kegiatan pengawasan yang dilakukan di Inspektorat III dapat dilihat pada Lampiran III.

Pelaksanaan pengawasan diatur dalam Pedoman Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 dan SOP yang telah ditetapkan. Pelaksanaan pengawasan dimulai dari penyusunan rencana audit, penyusunan PKA, KKA, dan temuan hasil audit.

Tingkat kualitas laporan keuangan Kementerian Perindustrian sudah mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

3. Perspektif Pembelajaran Organisasi

a. Meningkatnya kemampuan SDM APIP

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentase pegawai yang sesuai diklat dari seluruh pegawai Inspektorat III	90 %	100%	100
Jumlah auditor yang menulis artikel/karya tulis yang dipublikasikan	4 orang	4 orang	100
Persentase kepuasan pelanggan terhadap layanan pengawasan	90 %	89%	98,89

Pada tahun 2015 seluruh pegawai Inspektorat III telah mendapatkan diklat sesuai dengan kompetensi masing-masing. Diklat/pelatihan yang diikuti pada tahun 2015 diantaranya adalah kegiatan Peningkatan Kemampuan SDM (Capacity Building) Inspektorat Jenderal di Tanjung Lesung pada

tanggal 12-14 Agustus 2015 dan Workshop Audit Jasa Konsultansi di Bandung tanggal 9-12 September 2015.

Jumlah auditor yang menulis artiker/karya tulis yang dipublikasikan pada berbagai sumber khususnya di Majalah Solusi Inspektorat Jenderal pada tahun 2015 sebanyak 4 orang yaitu Singgih Budiono, Amran, Rayersad Saesar A dan Noa Salfhali.

Presentase kepuasan pelanggan yang didapatkan oleh Inspektorat III sedikit dibawah target yang telah ditetapkan yaitu hanya 98,89 %. Survei kepuasan pelanggan sendiri dilakukan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal.

b. Organisasi yang efektif

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Nilai akuntabilitas kinerja Inspektorat III	B	B	100
Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 :2008	1 Sertifikat	1 sertifikasi	100

Nilai akuntabilitas kinerja yang dicapai oleh Inspektorat III pada tahun 2015 memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu B, hal ini tidak lepas dari peran dan kerja sama seluruh pegawai di Inspektorat III.

Pada tahun 2015 Inspektorat III berhasil mempertahankan sertifikasi Penerapan sistim manajemen mutu ISO-9001:2008 yang diaudit secara berkala di tiap tahunnya.

c. Perencanaan dan penganggaran yang berkualitas

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan	85 %	99%	100
Persentase penyerapan anggaran Inspektorat III	90 persen	96,13 persen	100

Pencapaian realisasi anggaran Inspektorat III tahun 2015 (Januari-Desember) berjumlah Rp. 3,309,551,749,- atau sebesar 96,13 %, dimana realisasi tersebut telah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 90 %. Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan dipastikan dapat dilakukan dengan realisasi mencapai 99%.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Capaian realisasi berdasarkan jenis kegiatan secara fisik dan keuangan pada Tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 5 sebagai berikut :

Tabel 5. Capaian Realisasi Keuangan Inspektorat III Tahun 2015

JENIS KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP.)	REALIASI TAHUN 2015		SISA ANGGARAN	
		KEUANGAN (RP.)	%	J U M L A H (RP.)	%
LAPORAN HASIL PENGAWASAN INSPEKTORAT III	1.359.720.000	1,356,577,634	99.77	3,142,366	0.23
LAPORAN HASIL REVIU INSPEKTORAT III	751.580.000	748,734,130	99.62	2,845,870	0.38
LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI INSPEKTORAT III	754.142.000	706,554,835	93,69	47,597,165	6,31
LAYANAN MANAJEMEN KINERJA INSPEKTORAT III	394.520.000	349,367,150	88.55	45,152,850	11.45
DOKUMEN AKUNTABILITAS PENGAWASAN INSPEKTORAT III	182.680.000	148,328,000	81.20	34,352,000	18.80
TOTAL	3.442.642.000	3,309,551,759	96.13	133,090,251	3.87

Berdasarkan tabel diatas pencapaian realisasi anggaran Inspektorat III tahun 2015 berjumlah Rp. 3,309,551,749,- atau sebesar 96,13 %, dimana realisasi tersebut telah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 90 %.

BAB IV PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat III tahun 2015 dinilai berhasil dan berjalan dengan baik. Hasil tersebut dapat dilihat dari pencapaian realisasi anggaran Inspektorat III tahun 2015 berjumlah Rp. 3,309,551,749,- atau sebesar 96,13 %, dimana realisasi tersebut telah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 90 % serta pencapaian kinerja yang mencapai 99.03 %. Dalam pelaksanaan kegiatan Inspektorat III tidak terdapat permasalahan baik dalam kegiatan sudah sesuai PKPT dan keuangan baik pertanggungjawaban sesuai prosedur yang ada.

B. PERMASALAHAN/KENDALA

Dalam pelaksanaan kegiatan Inspektorat III Triwulan IV periode Oktober-Desember tahun 2015 tidak ada hambatan dan kendala namun masih terdapat target Tapkin Inspektorat III tahun 2015 yang belum mencapai target yaitu indikator kinerja “ Presentase kepatuhan unit melakukan Pelayanan Publik sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum” hanya mencapai nilai 68,94 % dari target yang ditetapkan sebesar 75 %.

C. UPAYA DAN STRATEGI PEMECAHAN

1. Disamping itu terdapat penetapan indikator kinerja yang kurang tepat yaitu pada indikator “Presentase Kepuasan Pelanggan terhadap layanan pengawasan” Mendorong Unit meningkatkan Pelayanan Publik sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum melalui Audit/Monev Aspek Pelayanan Publik dengan memberikan rekomendasi perbaikan pelayanan publik yang belum mencapai Standar Pelayanan Publik Minimum.
2. Mengusulkan perbaikan Indikator Kinerja “Presentase Kepuasan Pelanggan terhadap layanan pengawasan” yang semula menggunakan indikator presentase menjadi Indikator tingkat kepuasan berdasarkan skala dengan contoh “tidak puas, cukup puas, puas, sangat puas”

LAMPIRAN 1

PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon I/II : Inspektorat Jenderal/Inspektorat III
Tahun Anggaran : 2015

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Persentase indikator (%)	Persentase Sasaran (%)
Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder (S)						
1	Meningkatnya ketaatan terhadap perundang-undang	Persentase temuan BPK dibawah materiality threshold	<3 %	0,3324%	100	100
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP Kementerian	Predikat B	BB	100	100
		Persentase nilai SAKIP satuan kerja Eselon I minimal B	85 %	100%	100	
3	Meningkatnya Integritas Pelayanan Publik	Persentase kepatuhan unit melaksanakan pelayanan publik sesuai standar pelayanan minimum	75 %	68,74%	91,65	91,65
4	Meningkatnya efektivitas penerapan sistem pengendalian internal	Jumlah satuan kerja yang menerapkan Sistem Pengendalian Intern hingga level 3	6 satker	7 Satker	100	100
5	Meningkatnya kualitas evaluasi pelaksanaan kebijakan industri	Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri yang ditindak lanjuti	1 Rekomendasi kebijakan	1 Rekomendasi kebijakan	100	100
Perspektif Proses Internal						
6	Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengawasan	Persentase Pelak-sanaan pengawasan yang sesuai PKPT	90 %	92%	100	100
		Persentase pengawasan yang sesuai pedoman dan prosedur /standar pengawasan	80 %	100 %	100	
		Opini BPK atas laporan keuangan kementerian	WTP	WTP pemeriksaan	100	

			oleh BPK			
Perspektif Pembelajaran Organisasi						
7	Meningkatnya kemampuan SDM APIP	Persentase pegawai yang sesuai diklat dari seluruh pegawai Inspektorat III	90 %	100%	100	99,63
		Jumlah auditor yang menulis artikel/karya tulis yang dipublikasikan	4 orang	4 orang	100	
		Persentase kepuasan pelanggan terhadap layanan pengawasan	90 %	89%	98,89	
8	Organisasi yang efektif	Nilai akuntabilitas kinerja Inspektorat III	B	B	100	100
		Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 :2008	1 Sertifikat	1 sertifikasi	100	
9	Perencanaan dan penganggaran yang berkualitas	Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan	85 %	99%	100	100
		Persentase penyerapan anggaran Inspektorat III	90 persen	96,13 persen	100	
Pencapaian Keseluruhan						99,03 %

LAMPIRAN 2

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK)

Unit Organisasi Eselon II : Inspektorat III
Tahun Anggaran : 2015

No.	Program	Kegiatan					Persentase Capaian (%)	Ket.
		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Laporan hasil pengawasan Inspektorat III	a) Pemeriksaan terhadap unit Eselon I dan pusat-pusat	<u>Masukan:</u> - PKPT - Dana	Auditi Rp.	24 1.359.720.000	24 1.356.577,634	100% 99,77%	
		b) Pemeriksaan terhadap dekonsentrasi/PIKM	<u>Keluaran:</u> LHP	Laporan	24	24	100%	
		c) Pemeriksaan terhadap Efektivitas Pemberian Bantuan Mesin dan Peralatan	<u>Hasil:</u> Memastikan penyelenggaraan tugas dan kegiatan baik fasilitatif maupun substantif telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Paket	24	24	100%	
		d) Pemeriksaan terhadap Balai Besar dan Baristand	<u>Manfaat:</u> Bahan masukan bagi pimpinan dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja satker	Paket	24	24	100%	
		e) Pemeriksaan terhadap Sekolah-Sekolah dan Balai Diklat	<u>Dampak:</u> Pengambilan kebijakan dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.	Paket	24	24	100%	

2	Laporan Hasil Riviu Inspektorat III	a) Melaksanakan Riviu Laporan Keuangan dan BMN Semester I dan II serta Riviu RKA-KL Pagu Definitif dan Indikatif unit eselon I pusat-pusat, dan unit vertikal pada Kementerian Perindustrian	<u>Masukan:</u> - PKPT - Dana	Auditi Rp.	15 751.580.000	15 748.734.130	100% 99,62%	
			<u>Keluaran:</u> LHR Riviu LK & BMN Semester I dan II sebanyak 30 Laporan LHR Riviu RKA-KL sebanyak 2 Laporan	Laporan	32	32	100%	
			<u>Hasil:</u> Memastikan laporan Keuangan/BMN sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (PP no.24 tahun 2004)	Paket	1	1	100%	
			<u>Manfaat:</u> Bahan masukan bagi pimpinan dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan akuntabilitas kinerja satker	Paket	1	1	100%	
			<u>Dampak:</u> Akuntabilitas pengelolaan keuangan negara secara menyeluruh di Lingkungan Kementerian Perindustrian	Paket	1	1	100%	
3	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Inspektorat III	a) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi SAKIP b) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi	<u>Masukan:</u> - Auditi - Dana	Jumlah Rp.	15 754.142.000	15 748.734.130	100% 93,69%	
			<u>Keluaran:</u> Laporan Hasil Monitoring	Laporan	2	2	100%	
			<u>Hasil:</u> Penilaian efektivitas pemberian bantuan dalam pengembangan industri di daerah	Paket	1	1	100%	
			<u>Manfaat:</u> Bahan masukan bagi pimpinan dalam penyusunan kebijakan	Paket	1	1	100%	
			<u>Dampak:</u> Pertumbuhan bidang industri di daerah	Paket	1	1	100%	

4	Layanan Manajemen Kinerja Inspektorat III	a) Melakukan Layanan Manajemen Inspektorat III berupa Penyusunan Dokumen PKPT, penerapan manajemen mutu ISO 9001:2008 dan budaya kerja 5K	<u>Masukan:</u> - Dana	Rp.	394.520.000	349.367.150	88,55%	
			<u>Keluaran:</u> layanan manajemen	bulan	12	12	100%	
			<u>Hasil:</u> Dokumen PKPT dan manajemen mutu ISO 9001:2008 dan budaya kerja 5K	Dokumen	2	2	100%	
			<u>Manfaat:</u> Administrasi kegiatan dapat dilakukan dengan baik	Paket	1	1	100%	
			<u>Dampak:</u> Meningkatnya akuntabilitas Inspektorat III	Paket	1	1	100%	
			<u>Keluaran:</u> Laporan Pertanggungjawaban	Bulan	10	10	100%	
			<u>Hasil:</u> Penilaian Kinerja Inspektorat III	Paket	1	1	100%	
			<u>Manfaat:</u> Dapat mengukur kinerja	Paket	1	1	100%	
			<u>Dampak:</u> Kinerja Inspektorat III lebih meningkat	Paket	1	1	100%	
5	Dokumen Akuntabilitas Pengawasan Inspektorat III	a. Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Inspektorat III diantaranya Rencana Kinerja 2015, Penetapan Kinerja 2015, Penyusunan Laporan Triwulan dan Penyusunan LAKIP 2015	<u>Masukan:</u> - Dana	Rp.	182.680.000	148.328.000	81,20%	
			<u>Keluaran:</u> Dokumen Akuntabilitas Kinerja	Dokumen	1	1	100%	
			<u>Hasil:</u> LAKIP Inspektorat III	Paket	1	1	100%	
			<u>Manfaat:</u> Dapat mengukur pencapaian kinerja tahun 2015	Paket	1	1	100%	
			<u>Dampak:</u> Kinerja Inspektorat III lebih meningkat dan sebagai acuan untuk kegiatan tahun 2016	Paket	1	1	100%	

LAMPIRAN III

DAFTAR KEGIATAN PENGAWASAN INSPEKTORAT III TAHUN 2015

Audit Kinerja		Reviu LK		RB & PMPRB		Audit Hibah	
1.	BDI Jakarta Tgl.30 Maret -4 April 2015	1.	SETJEN Tgl. 2-4 Maret 2015	1.	Yogyakarta Tgl.21-24 Oktober 2015	1.	Kab. Kediri (Cooling Unit Susu) Tgl. 5-8 Maret 2015
2.	BDI Padang Tgl.30 Maret -4 April 2015	2.	Ditjen IA Tgl. 2-4 Maret 2015	2.	Bandung Tgl.13-16 Oktober 2015	2.	Kab. Sukabumi (Industri Furniture dan Cooling Unit Susu) Tgl. 5-7 Maret 2015
3.	Dekon Prov. Sumut Tgl.8-13 April 2015	3.	Pusdatin Tgl. 2-4 Maret 2015	3.	Bogor Tgl.13-16 Oktober 2015	3.	Kab. Lamongan (Pengolahan AMDK) Tgl. 5-7 Maret 2015
4.	Dekon Prov. Riau Tgl.8-13 April 2015	4.	BBIA Bogor Tgl. 9-13 Maret 2015	4.	Yogyakarta Tgl.27-30 Oktober 2015	4.	Kab. Minahasa Selatan (Proses ES Balok) Tgl. 6-8 Maret 2015
5.	Baristand Pontianak Tgl. 14-21 April 2015	5.	BBBBT Bandung Tgl. 9-13 Maret 2015	5.	Padang Tgl.27-30 Oktober 2015	5.	Kab. Banyuwangi (Cooling Unit Susu) Tgl. 6-8 Maret 2015
6.	Baristand Banjarbaru Tgl. 14-21 April 2015	6.	BBKKP Yogya Tgl. 9-13 Maret 2015	6.	Makassar Tgl.27-30 Oktober 2015	6.	Kab. Kuningan (Cooling Unit Susu) Tgl. 5-7 Maret 2015
7.	Baristand Surabaya Tgl. 22-29 April 2015	7.	Baristand Pontianak Tgl. 9-13 Maret 2015	7.	Yogyakarta Tgl.27-30 Oktober 2015	7.	Kab. Garut (Cooling Unit Susu) Tgl. 5-7 Maret 2015
8.	Dekon Prov. Sulteng Tgl.24-29 April 2015	8.	Baristand Banjarbaru Tgl. 16-20 Maret 2015	8.	Bogor Tgl.27-28 Nopember 2015	8.	Prov. NTB (Pengolahan Tembakau) Tgl.16 – 19 Juni 2015
9.	Dekon Prov. Banten Tgl.24-29 April 2015	9.	Baristand Surabaya Tgl. 16-20 Maret 2015	9.	Bogor Tgl.27-28 Nopember 2015	9.	Kab. Kendal (Industri Furniture) Tgl.29 Juni – 2 Juli 2015
10.	Dekon Prov. Kaltim Tgl.5-10 Mei 2015	10.	BDI Jakarta Tgl. 16-20 Maret 2015	10.	Jakarta Tgl.28 Agustus 2015	10.	Kab. Lampung Barat (Pengolahan Kelapa) Tgl.8-11 Sept 2015

11.	Dekon Prov. Jateng Tgl.5-10 Mei 2015	11.	BDI Padang Tgl. 16-20 Maret 2015	11.	Jakarta Tgl.30 Agustus 2015	11.	Prov. Lampung (Proses Es Balok) Tgl.8-11 Sept 2015
12.	BBIA Bogor Tgl.19-25 Mei 2015	12.	SMTI Lampung Tgl. 23-27 Maret 2015			12.	Kab. Subang dan Majalengka (Pengolahan Buah) Tgl.15-18 Sept 2015
13.	BBKPP Yogyakarta Tgl.4 – 13 Juni 2015	13.	SMAK Padang Tgl. 23-27 Maret 2015			13.	Kab. Sumedang dan Garut (Pengolahan Kopi & Unit Mobil Susu) Tgl.15-18 Sept 2015
14.	BBBBT Bandung Tgl.4 – 13 Juni 2015	14.	SMTI Aceh Tgl. 23-27 Maret 2015			14.	Kab. Magelang (Cetak Digital) Tgl.15-18 Sept 2015
15.	SMTI Aceh Tgl.16 – 22 Juni 2015	15.	AKA Bogor Tgl. 29 Juli -1 Agustus 2015			15.	Kab. Jepara (Industri Furniture) Tgl.15-18 Sept 2015
16.	Dekon Prov. NTB Tgl.16 – 21 Juni 2015	16.	SMAK Padang Tgl. 29 Juli -1 Agustus 2015			16.	Kab. Bogor (Produksi Tempe dan Cooling Unit Susu) Tgl.15-18 Sept 2015
17.	SMAK Padang Tgl.29 Juni – 4 Juli 2015	17.	BDI Padang Tgl. 29 Juli -1 Agustus 2015			17.	Prov. Sulbar (Pengolahan Rotan) Tgl.15-18 Sept 2015
18.	SMTI Lampung Tgl.29 Juni – 4 Juli 2015	18.	SMTI Lampung Tgl. 29 Juli -1 Agustus 2015			18.	Kab. Simalungun (Pengolahan Kopi) Tgl.15-18 Sept 2015
19.	AKA Bogor Tgl. 18-24 Agustus 2015	19.	BBIA Bogor Tgl. 29 Juli -1 Agustus 2015			19.	Kab. Tulungagung (Cooling unit susu) Tgl.30 Sept – 3 Okt 2015
20.	Dekon Prov. Papua Tgl.18-25 Agustus 2015	20.	Baristand Banjarbaru Tgl 3 – 6 Agustus 2015			20.	Kab. Batu (Cooling unit susu) Tgl.30 Sept – 3 Okt 2015
21.	Pusdatin Tgl. 1-18 Desember 2015	21.	BBKPP Yogyakarta Tgl 3 – 6 Agustus 2015			21.	Kab. Wonosobo (Cooling unit susu) Tgl.30 Sept – 3 Okt 2015
		22.	BBBBT Bandung Tgl 3 – 6 Agustus 2015			22.	Kab. Boyolali (Cooling unit susu) Tgl.30 Sept – 3 Okt 2015
		23.	BDI Jakarta Tgl 3 – 6 Agustus 2015				

		24.	Baristand Pontianak Tgl 3 – 6 Agustus 2015				
		25.	SMTI Aceh Tgl.26-29 Agustus 2015				
		26.	Baristand Surabaya Tgl.26-29 Agustus 2015				
		27.	Jakarta Tgl.19-20 Oktober 2015				
		28.	Jakarta Tgl.19-20 Oktober 2015				
		29.	Jakarta Tgl.21-23 Oktober 2015				
		30.	Bandung Tgl.22-23 Desember 2015				
		31.	Bandung Tgl. 28-29 Desember 2015				